

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI & KERANGKA BERFIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangat diperlukan bagi seorang peneliti untuk mencari sumber perbedaan dan posisi penelitiannya. Dalam pembahasan tinjauan ini, penulis ingin memberikan beberapa hasil kajian teori yang sangat berkaitan dengan peran lembaga filantropi. Beberapa subsistem. Terdapat 4 penelitian terdahulu yang telah diambil melalui tahapan filtrasi berdasarkan relevansi mendekati dengan penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya. Berikut penelitian terdahulu tersebut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdillah Ahsan dan Nadira Amalia	Kualitas Gizi dan Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Stunting di Indonesia (Juni 2018)	Jurnal ini mengangkat isu kualitas gizi dan sumber daya manusia terkait masalah stunting di Indonesia dengan menggunakan kerangka berfikir <i>Theory of Constraints</i> . Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai stunting di Indonesia dan mengusulkan rekomendasi strategi untuk mengatasi pertumbuhan stunting dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, ada empat hambatan dalam penurunan stunting, yaitu masalah pendidikan, hukum, ekonomi dan kemiskinan, serta masalah sosial budaya.

			<p>Rekomendasi strategi yang diusulkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah dengan melakukan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Gizi spesifik mencakup gizi pada masa kehamilan ibu dan gizi pada masa menyusui, sedangkan gizi sensitif mencakup faktor lingkungan dan gizi anak. Strategi lain yang disarankan melibatkan lembaga-lembaga Filantropi Islam dan lembaga keuangan mikro Islam untuk mengintensifkan program pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>Perbedaan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan:</p> <p>Penelitian ini akan berfokus pada peran Wadah Foundation dalam mengatasi stunting dengan pendekatan yang lebih spesifik pada aspek kesehatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi rekomendasi strategi umum, penelitian ini akan mendalami pada bagaimana Wadah Foundation, sebagai lembaga filantropi, dapat berkontribusi dalam penanggulangan stunting melalui program-program kesehatan yang terfokus.</p>			

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Husnul Mirzal dan Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra	Pendistribusian Dana Wakaf dengan Skema Conditional Cash Transfers (CCTs) sebagai Solusi atas Permasalahan Stunting di Indonesia	Jurnal ini mengkaji implementasi skema <i>Conditional Cash Transfers</i> (CCTs) sebagai solusi untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia melalui pendistribusian dana wakaf. Skema CCTs melibatkan penerimaan dana bantuan sosial oleh penerima yang

		(2020)	<p>memenuhi persyaratan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan skema CCTs dalam pendistribusian dana wakaf, dengan penerima wakaf yang juga diharuskan mematuhi persyaratan tertentu guna mendapatkan manfaat dari dana wakaf tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema CCTs dapat diterapkan dalam penyaluran dana wakaf untuk menurunkan tingkat stunting. Skema ini menargetkan keluarga tidak mampu yang memiliki ibu hamil dan anak-anak balita sebagai penerima manfaat. Penerima diwajibkan untuk memenuhi persyaratan seperti memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, memberikan dana wakaf dalam bentuk nutrisi dan fasilitas sanitasi yang layak, serta mengikuti pemantauan proses implementasi.</p>
Perbedaan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan:			<p>Penelitian ini menggambarkan bagaimana skema CCTs dapat diterapkan dalam penyaluran dana wakaf untuk menangani stunting. Fokusnya pada peran dana wakaf dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima wakaf (Mauquf Alaih) dalam upaya menurunkan stunting di Indonesia.</p> <p>Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan akan lebih mengkaji Peran Lembaga Filantropi Dalam Menangani Stunting (Studi Kasus di Yayasan</p>

Wadah Titian Harapan. Penelitian selanjutnya akan mengeksplorasi bagaimana Wadah Foundation dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan stunting, dengan fokus pada peran dan langkah konkret yang diambil oleh lembaga tersebut.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Rahmat Kurniawan	Otoritas Baitul Mal Aceh Dalam Menyukkseskan Sustainable Development Goals (2022)	Jurnal ini menganalisis peran Baitul Mal Aceh, sebuah Lembaga Pemerintah non-struktural di Aceh, dalam mensukkseskan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs). Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan yang diperkuat oleh Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Penelitian ini menggambarkan bagaimana Baitul Mal Aceh berkontribusi pada pencapaian SDGs dengan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) untuk berbagai tujuan, termasuk bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan syiar/dakwah.
<p>Perbedaan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan:</p> <p>Penelitian ini akan berfokus pada " Peran Lembaga Filantropi Dalam Menangani Stunting (Studi Kasus di Yayasan Wadah Titian Harapan)." Peneliti akan membahas peran lembaga filantropi, khususnya Wadah Foundation, dalam mengatasi masalah stunting pada anak. Kontribusinya dalam upaya penanganan kasus stunting di masyarakat. Ini merupakan perbedaan fokus yang signifikan dari penelitian sebelumnya yang lebih mengkaji peran Baitul Mal Aceh dalam mendukung SDGs melalui pendistribusian ZISWAF.</p>			

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Yunita Nur Afifah	Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah Dalam Mendukung <i>Sustainable Development Goals</i> (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta) (2020)	<p>Skripsi ini menganalisis kontribusi Lembaga Filantropi Islam berbasis zakat, infak, dan sedekah dalam mendukung <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dengan menggunakan Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis untuk mencocokkan dengan 17 tujuan SDGs.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta, seperti program ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, selaras dengan tujuan dan target SDGs. Program-program ini mencakup berbagai inisiatif seperti program ekonomi seperti Kampung Ternak, Warung Beres, dan Institut Mentas Unggul, serta program sosial seperti Lamusta dan kegiatan Volunteer. Program kesehatan meliputi Gerai Sehat, Pos Sehat, dan Kebun Sehat Keluarga, sedangkan program pendidikan termasuk beasiswa, <i>SLI</i>, <i>Inspiring Library</i>, dan Sabara.</p>

Perbedaan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan:

Penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada Peran Lembaga Filantropi Dalam Menangani Stunting (Studi Kasus di Yayasan Wadah Titian Harapan). Fokus penelitian akan difokuskan pada pelatihan kapasitas kader dan komunitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam mengatasi masalah stunting. Penelitian ini akan lebih khusus dalam mengulas bagaimana Wadah Foundation berkontribusi dalam upaya penanggulangan stunting dengan fokus pada aspek pelatihan dan kapasitas masyarakat. Meskipun keduanya membahas peran lembaga filantropi dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian yang akan dilaksanakan lebih pada penanganan kasus stunting melalui pelatihan dan kapasitas kader dan komunitas.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Candarmaweni & Amy Yayuk Sri Rahayu	Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru “New Normal” Melalui Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pandeglang (2020)	Jurnal ini membahas tentang dampak pandemi <i>COVID-19</i> terhadap ekonomi dan pencegahan stunting di Indonesia, serta pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program untuk mengatasi masalah tersebut.

Perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan :

Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan new normal pada masa *COVID-19* dalam menangani stunting.

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada Peran Lembaga Filantropi Dalam Menangani Stunting (Studi Kasus di Yayasan Wadah Titian Harapan. Fokus penelitian akan difokuskan pada pelatihan kapasitas kader dan komunitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam mengatasi masalah stunting. Penelitian yang akan dilaksanakan akan membahas tantangan serta keberhasilan Wadah dalam mencapai pencegahan stunting.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Filantropi dan Lembaga Filantropi

a) Filantropi

Filantropi berasal dari kata Yunani "*philein*" yang berarti cinta dan "*anthropos*" yang berarti manusia (Latief, 2010). Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai kemanusiaan dan sesama manusia, sehingga mereka menyumbangkan waktu, uang, dan tenaga mereka untuk membantu orang lain (Bawaqi, 2019). Secara lebih luas, filantropi merupakan kesadaran untuk memberi dan membantu untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Potensi filantropi umat Islam terwujud dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kebaikan lainnya.

Secara historis, Filantropi di Indonesia berasal dari unsur Filantropi Tradisional yang didasarkan pada agama, baik Kristen maupun Islam. Kegiatan Filantropi keagamaan di Indonesia terkait dengan kegiatan misionaris dan dakwah. Misalnya, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam yang didirikan pada tahun 1912, menyediakan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial melalui berbagai lembaga pendidikan, rumah sakit, rumah

bersalin, dan panti sosial yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Ini merupakan contoh dari tradisi lama Filantropi berbasis komunitas yang menyediakan pelayanan sosial di Indonesia yang mencontohkan cara gerakan misionaris Kristen yang telah dilakukan selama lebih dari setengah abad sebelum Muhammadiyah berdiri. Secara umum, ada dua arus gerakan Filantropi di Indonesia. Arus pertama adalah Filantropi Tradisional yang berbasis pada agama, seperti kegiatan misionaris dan dakwah yang dilakukan oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Arus kedua adalah Filantropi Modern yang dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang muncul pada tahun 1970-an. Organisasi masyarakat sipil ini muncul sebagai tanggapan terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh proses modernisasi, seperti kemiskinan, perburuhan, lingkungan, gender, hak asasi manusia, demokrasi, ketidakadilan sosial, narkoba, HIV/AIDS. Organisasi masyarakat sipil ini tidak hanya menyediakan pelayanan tetapi juga berfokus pada advokasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Filantropi Modern di Indonesia didefinisikan sebagai tindakan sukarela yang ditujukan untuk perubahan sosial yang lebih nyata dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasawarsa 1990-an, Filantropi Modern di Indonesia ditentukan oleh gagasan tentang partisipasi dan pemberdayaan rakyat, advokasi, kebebasan, dan hak asasi, yang semuanya diterapkan dalam tekanan rezim Soeharto (Jusuf, 2007)

b) Lembaga Filantropi

Lembaga filantropi adalah lembaga non-profit, yaitu lembaga yang tidak mencari keuntungan dari implementasi program-programnya. Tujuan dari berdirinya lembaga

filantropi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaatnya dalam jangka panjang dan berkelanjutan, yang berarti bahwa implementasi program tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat saja. Filantropi muncul sebagai referensi masyarakat Barat pada abad ke-18, saat negara, individu, dan masyarakat saling peduli terhadap kaum marginal, yang memiliki asumsi tentang tanggung jawab sosial. Kata filantropi berasal dari kata "*Loving people*" yang artinya peduli terhadap orang lain. Saat ini, filantropi telah bergeser dari konsep kepedulian menjadi tindakan sukarela untuk kebaikan publik (Bamualim & Abubakar, 2005).

2.2.2 Peran Lembaga Filantropi

Istilah "Peran" sering kali disebutkan oleh banyak orang. Kita sering mendengar kata "peran" terkait dengan posisi atau status seseorang. Peran adalah sikap atau tindakan yang diharapkan oleh masyarakat atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status tertentu. Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi: Suatu Pengantar" (2012), dijelaskan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Individu yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya saat ini maka disebut sebagai peran. Perbedaan antara kedudukan dan peranan ini penting untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, begitu pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Seperti halnya kedudukan, peranan juga memiliki dua arti. Setiap individu memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup mereka. Itu berarti perannya dalam masyarakat menentukan sikap bertindak untuk memberikan kesempatan mereka terhadap. Peran adalah aspek dinamis dari status, ketika

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status mereka, mereka sedang melakukan peran.

Menurut Dewi Wulan Sari (2009:106), peran adalah pandangan tentang apa yang harus dilakukan individu dalam masyarakat, termasuk permintaan perilaku dari masyarakat pada seseorang dan merupakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang memegang posisi dalam status sosial. Syarat peran mencakup tiga hal: (1) peran meliputi norma-norma yang terkait dengan posisi seseorang dalam masyarakat, (2) peran adalah pemikiran tentang perilaku individu dalam masyarakat sebagai organisasi, (3) peran adalah serangkaian aturan yang teratur karena jabatan. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup dalam kelompok dan dalam interaksi antar anggota masyarakat.

Peran lembaga filantropi adalah tindakan sukarela yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau individu yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat dalam hal pembangunan sosial dan kesejahteraan. Bantuan yang diberikan oleh Lembaga Filantropi dapat berupa dana, sumber daya, atau jasa yang diberikan untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan. Lembaga filantropi dapat berfokus pada berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Penelitian tentang *charity* di Indonesia menempati urutan pertama dalam World Giving Index tahun 2018 sebagai negara terdermawan di dunia (Asmawati, 2022). Namun, perlu diketahui adanya perbedaan antara Filantropi dengan *charity* yaitu Perbedaan antara konsep filantropi dan *charity* terletak pada cara penyelenggaraan bantuan yang diberikan. *charity* cenderung memberikan bantuan langsung dengan tujuan mengatasi akibat dari masalah yang sedang terjadi. Salah satu contoh *charity* adalah memberikan bantuan saat terjadi bencana yang membutuhkan

distribusi cepat untuk memberikan pertolongan awal. Menariknya, angka stunting masih rendah sekalipun peringkat Indonesia menjadi negara terbaik dalam berderma ke sesama. Dengan demikian Filantropi mengacu pada gagasan bahwa filantropi didasarkan pada konsep pemberian yang terorganisir, strategis, dan berkelanjutan. (Visnu J & DKK, 2020)

1. *Organized Giving*: Ini mengacu pada pendekatan terstruktur dalam memberikan sumbangan atau bantuan. Filantropi yang terorganisir berarti adanya perencanaan yang matang, proses seleksi yang hati-hati, dan fokus pada tujuan tertentu dalam memberikan dukungan kepada organisasi atau program amal. Wadah Foundation menerapkan pendekatan yang sangat terorganisir dan terencana dengan seksama. Mereka memahami pentingnya perencanaan sumber daya, alokasi waktu, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mencerminkan tingkat keseriusan mereka dalam menghadapi tantangan sosial yang ada di masyarakat dan tekad mereka untuk menciptakan perubahan positif.

Dalam konteks terorganisir di Wadah, ini mengacu pada adanya rencana kerja berkelanjutan, seperti pelaksanaan program evaluasi dan *monitoring* dalam upaya penanganan stunting. Meskipun secara tidak langsung melakukan evaluasi melalui kader kesehatan, Wadah Foundation tetap memastikan kontrol terhadap penurunan prevalensi stunting di daerah tersebut. Ini dicapai melalui kontribusinya dalam pendampingan kader kesehatan dan penguatan kapasitas mereka. Wadah memiliki susunan organisasi yang terstruktur dalam mendukung pelaksanaan program dengan efisiensi yang tinggi, dengan kepala bidang yang bertanggung jawab masing-masing, termasuk kepala bidang kesehatan di Wadah *Foundation*.

Menggambarkan pendekatan filantropi yang terstruktur,

diarahkan secara cerdas, dan berfokus pada penciptaan dampak yang berkelanjutan dalam upaya membantu masyarakat atau tujuan amal tertentu. Menariknya, lembaga filantropi mempunyai konsep *social agility*, yaitu memiliki kapabilitas yang luas dan fleksibel, mampu dengan mudah beradaptasi dan responsif. Menunjukkan kelincahan dan fleksibilitas dalam menangani masalah dengan memberdayakan kader-kader, sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. (Asmawati, 2022)

2. *Strategic*: Filantropi strategis adalah pendekatan yang mengarah pada alokasi sumber daya dengan cerdas dan efektif untuk mencapai dampak yang maksimal. Ini melibatkan penentuan tujuan jangka panjang, analisis kebutuhan, identifikasi peluang perubahan positif, dan penyesuaian pendekatan berdasarkan informasi dan perkembangan terkini.

Dalam pelaksanaan pemberian pengetahuan kepada kader kesehatan, Wadah biasanya memberikan pemahaman kepada kader, cara pendekatan yang efektif kepada masyarakatnya dengan personal atau individu. Pendekatan perorangan ini seringkali sangat efektif karena memungkinkan kader kesehatan untuk memahami kebutuhan kesehatan individu secara lebih mendalam, memberikan informasi yang spesifik, dan merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh setiap individu atau keluarga. Pendekatan perorangan oleh kader kesehatan biasanya membahas mengenai dukungan psikososial, pemantauan perkembangan anak dan memberikan saran tentang pola makan. Ini adalah salah satu cara Wadah Foundation memberikan pelatihan ke kader kesehatan dalam pentingnya dalam penanganan masalah kesehatan seperti stunting, di mana pendekatan yang personal dapat membantu masyarakat memahami pemenuhan gizi yang

baik dan praktik-praktik kesehatan yang diperlukan untuk mencegah stunting pada anak-anak.

3. *Sustainable*: Dalam konteks filantropi, berkelanjutan berarti bahwa upaya filantropis ditujukan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang berlanjut setelah bantuan awal diberikan. Filantropi berkelanjutan mengejar solusi jangka panjang yang memperkuat komunitas atau program yang didukung, bahkan setelah dukungan filantropis awal telah berakhir.

Dalam praktiknya, Wadah menciptakan kader kesehatan yang berkualitas. Data yang didapatkan oleh peneliti juga mengungkapkan bahwa Wadah ini memberikan beasiswa kepada kader kesehatan RWD yang menjadi tanggung jawabnya sehingga kader dapat melanjutkan pendidikannya di S1. Kebanyakan dari kader tersebut lulusan Sarjana Pendidikan. Hal ini menciptakan dampak panjang yang diberikan Wadah kepada kader kesehatan dampingannya. Kemudian kader kesehatan yang telah didampingi Wadah, menjadi harapan bagi masyarakat sekitarnya untuk jadi agen perubahan kondisi pencegahan stunting.

Filantropi umumnya diartikan sebagai tindakan sukarela yang dilakukan untuk kepentingan publik. Ada dua jenis filantropi yaitu tradisional dan modern (Jusuf, 2007). Filantropi tradisional berbasis pada karitas atau belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian bantuan sosial seperti bantuan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi kaum yang tidak mampu. Orientasi filantropi tradisional cenderung individual, dimana para dermawan sering kali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan meningkatkan status sosial mereka di mata publik. Model ini justru memperkuat relasi kekuasaan antara kaya dan miskin. Dalam skala makro, filantropi tradisional hanya mampu mengobati gejala kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan struktural. Sedangkan Filantropi

Modern diartikan sebagai tindakan kebaikan yang difokuskan pada pembangunan sosial dan keadilan sosial. Ini berbeda dengan Filantropi Tradisional yang lebih berfokus pada pemberian kepada kaum tidak mampu tanpa menyentuh masalah struktural yang menyebabkan kemiskinan. Filantropi Modern bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan struktural dengan mengumpulkan sumber daya untuk mendukung kegiatan yang mengungkap masalah tersebut. Lingkup dari sebuah filantropi modern cukup luas karena mencakup struktural status, pendidikan, kesehatan, perbedaan gender, lingkungan hidup dan masalah sosial-budaya.

a) Peran Pendampingan Kader Kesehatan

Peran pendamping yayasan terhadap kader kesehatan mencakup memberikan dukungan, melatih, dan memberikan panduan dalam mengembangkan kemampuan kader kesehatan. Pendamping membantu untuk memperkuat pengetahuan, keahlian, dan pemahaman mengenai permasalahan kesehatan, sehingga kader dapat secara efektif menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, pendampingan juga mendorong kerjasama dan memfasilitasi akses ke sumber daya guna meningkatkan mutu dan cakupan program kesehatan yang diselenggarakan oleh Yayasan (Kostania, 2018). Kemudian menurut Visnu J & DKK (2020) dalam buku laporan Pemetaan Lembaga Filantropi Kesehatan di Indonesia, Filantropi dilakukan secara terorganisir berarti adanya perencanaan yang matang, proses seleksi yang hati-hati, dan fokus pada tujuan tertentu dalam memberikan dukungan kepada program amal. (Visnu J & DKK, 2020) Tindakan ini juga berkontribusi pada pengembangan dan penguatan kemampuan komunitas penerima, serta diupayakan agar tidak menimbulkan ketergantungan.

Pendekatan yang diterapkan oleh Wadah *Foundation* dalam memberikan akses yang tiada batas kepada kader kesehatan sangat mendukung. Memperbolehkan kader kesehatan untuk mengakses *chatting* kapanpun melalui *WhatsApp* mendukung mereka dalam tugas-tugas pencegahan dan penanganan stunting. Akses *chatting* yang tidak terbatas menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara Wadah *Foundation* dan kader kesehatan. Ini sangat penting karena kader kesehatan mungkin menghadapi situasi yang kompleks atau butuh bantuan dalam situasi darurat. Kemudahan berkomunikasi dapat membantu mengatasi kendala-kendala ini dengan lebih cepat. Ini dapat meningkatkan motivasi dan komitmen kader dalam melaksanakan tugas mereka.

(Purba SH, 2019) Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan program stunting sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 yang mengatur panduan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Upaya untuk mengurangi prevalensi stunting melibatkan berbagai langkah, termasuk:

1. Ibu Hamil dan Bersalin:

- Melakukan tindakan pada rentang waktu 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
- Memprioritaskan pelayanan antenatal care (ANC) yang berkualitas.
- Mendorong peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan.
- Melaksanakan program pemberian makanan dengan nutrisi tinggi, kalori, protein, dan mikronutrien (TKPM).

2. Balita:

- Memantau pertumbuhan balita secara berkala.
- Melaksanakan inisiatif pemberian makanan ekstra kepada anak balita atau Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
- Menyediakan stimulasi awal dalam perkembangan anak.
- Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi balita.

3. Anak Usia Sekolah:

- Meremajakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- Memperkuat struktur Tim Pembina UKS.
- Melaksanakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS).
- Menetapkan lingkungan sekolah sebagai zona bebas rokok dan narkoba.

4. Remaja:

- Memberikan penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi seimbang, larangan merokok, dan narkoba.
- Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.

5. Dewasa Muda:

- Memberikan penyuluhan dan layanan keluarga berencana (KB).
- Melakukan identifikasi awal penyakit yang dapat menyebar dan yang tidak menyebar.
- Meningkatkan penyuluhan mengenai PHBS, pola gizi seimbang, serta larangan merokok dan menggunakan narkoba (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

b) Penguatan Kapasitas Kader

Konsep ini menjadi lebih kuat dengan kontribusi filantropi dalam menangani masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan di masyarakat melalui penguatan lembaga atau organisasi melalui kadernya yang diatur oleh kerangka hukum pemerintahan. Hal ini terkait dengan sifat istimewa lembaga-lembaga ini dalam usaha mereka untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi umat (Makhrus, 2018).

Data yang diperoleh dari hasil notulensi forum diskusi Wadah Foundation pada tanggal 13 April 2023 yang dilaksanakan di *zoom* membahas mengenai “Kesehatan Ibu dan Anak”. Partisipan yang hadir ada 27 orang dari berbagai kader komunitas. Ada yang dari seperti dari Yogya, Kupang, Koa, Sikka, Ambon, Lombok, Warabal dan Cibodas. Kader komunitas dikumpulkan dalam *zoom meeting* untuk mendapatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk membuat kader lebih kompeten dan mandiri dalam melaksanakan tugas mereka.

Dalam konteks penguatan kapasitas kader, Wadah Foundation memberikan pelatihan kepada kader kesehatan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek terkait pencegahan stunting, seperti gizi, pola makan sehat, perawatan anak, dan pemantauan pertumbuhan balita. Pelatihan ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Peran Wadah Foundation adalah mengadvokat antara *stake holder* dengan kader Kesehatan yang membutuhkan pengetahuan mengenai pencegahan stunting (Jusuf, 2007). *stake holder* atau narasumber di forum diskusi merupakan anak didik Wadah dan akan lulus menjadi seorang bidan dari

Warabal, sebut saja SNA. SNA membawakan materi mengenai pengertian PHBS, Manfaat PHBS, Macam-macam PHBS pada ibu hamil dan anak seperti contohnya melakukan pemeriksaan kehamilan, pengecekan laboratorium saat hamil (berguna untuk mengidentifikasi penyakit berbahaya saat kehamilan, melakukan persalinan di tenaga kesehatan dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan lain sebagainya. Selanjutnya materi yang akan diberikan.

Selanjutnya, narasumber yang mengisi forum diskusi tersebut ada Bidan WT dengan pembahasan “menurunkan atau mencegah stunting”, secara garis besar, dalam pencegahan stunting ini, Bidan WT memberikan arahan kepada kader kesehatan yaitu kader melakukan pendekatan kepada ibu hamil tujuannya agar ibu hamil mau datang dan berkonsultasi sehingga dapat perbaikan dan pelayanan dengan baik. Bidan WT juga menjelaskan bahwa kader kesehatan tidak perlu tersinggung dalam menghadapi ibu hamil karena ibu hamil cenderung memiliki emosional yang tidak stabil (sensitif). Selanjutnya kader bisa melakukan pemantauan dalam pelaksanaan pencegahan stunting yang sudah diberikan langkah-langkahnya oleh Bidan WT. Di forum ini juga dibahas bagaimana cara membangun stigma seorang suami kepada istri untuk lebih mengerti kondisi dan situasi mayoritas bapak-bapak menganggap urusan anak, kehamilan dan kesehatan adalah urusan seorang ibu/istri. Solusi Bidan WT adalah memberikan pemahaman pra nikah, kader diharapkan melakukan pendekatan kepada ibu hamil dan bapak untuk menjelaskan kebutuhan ibu dan mengetahui apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Seorang kader kesehatan harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi (Bawaqi, 2019) Kader kesehatan yang melakukan pendekatan

terhadap harus secara pendekatan dengan menjadi teman bagi mereka sehingga mereka bisa nyaman, setelah itu mereka mau mendengarkan kita. Mengajak mereka berdiskusi dengan santai sehingga mereka terbuka tetapi perlu waktu yang panjang bagi mereka. Saat ngobrol tidak membahas inti permasalahan tetapi membahas yang lain dulu tetapi ujungnya tetap ke inti permasalahan. Salah satu kader kesehatan di forum diskusi juga membahas kegiatan pelaksanaan kader kesehatan bekerjasama dengan bidan untuk memberikan tablet penambah darah kepada remaja 1 bulan 4 kali dan remaja harus minum di depan kader.

2.2.3 Lembaga Filantropi dalam Kesehatan

Setiap individu memiliki hak atas kesehatan di seluruh negara, dan tugas pemerintah adalah meningkatkan standar kesehatan bagi semua warga. Organisasi yang terlibat dalam filantropi di sektor kesehatan memahami bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (Visnu J & DKK, 2020)

Adapun studi kasus tentang lembaga filantropi yang telah berperan dalam sektor kesehatan di Indonesia menurut dari hasil data asesmen wawancara yang menjadi sampel dalam kegiatan asesmen lapangan peran filantropi untuk pembangunan kesehatan (Pusat Analisis Determinan Kesehatan, 2019). Antara lain:

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
- b. Puskesmas dan Rumah Sakit umum daerah
- c. PT Yukata Manufacturing Indonesia
- d. PT. Indofood Food Seasoning

Adapun dalam Pemerintah Indonesia telah menyediakan layanan puskesmas yang hampir disetiap masing – masing daerah mempunyai

puskesmas. Puskesmas merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam unit pelayanan kesehatan dasar yang dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar di tingkat pertama dan memberikan pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Namun terkadang, puskesmas terkendala dalam kondisi geografis dan ekonomi mengakibatkan tidak meratanya layanan kesehatan di daerah pedalaman dan terpencil Indonesia.

Wadah *Foundation* yang memberikan kontribusinya pada pencegahan stunting juga hampir sama cara kerjanya sama seperti puskesmas yaitu memberikan pelatihan, dukungan, dan sumber daya teknis kepada Posyandu untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dasar tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Wadah mengupayakan optimalisasi program pemerintah agar masyarakat kurang mampu dapat merasakan manfaatnya.

a) **Stunting**

Para ahli mengatakan bahwa, ada 45 senyawa dan unsur kimia yang harus dikonsumsi manusia dalam pemenuhan gizi seimbang yang bisa kita dapatkan di dalam bahan makanan. Akan tetapi, tidak ada satu jenis makanan yang dapat memberikan ke-45 nutrisi tersebut. Oleh sebab itu, kebutuhan makan menjadi bervariasi sehingga jika digabungkan akan memenuhi 45 nutrisi tersebut. Setiap sel di dalam tubuh memiliki tugasnya masing-masing yang membuat sel tersebut memiliki jenis senyawa makanan yang berbeda-beda pula, misalnya pada sel kelenjar tiroid memerlukan unsur yodium yang digunakan untuk pemrosesan nutrisi di dalam tubuh. Manusia memerlukan semua hal itu untuk beraktivitas seperti berdiri, bernafas, berjalan, menggerakkan persendian, karena semua itu memerlukan energi dari makanan yang kita makan,

bahkan nutrisi diperlukan untuk manusia dalam berfikir.

Stunting didefinisikan sebagai kondisi dimana panjang atau tinggi badan anak yang diukur menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO (2010) tergolong kurang dibandingkan dengan umur anak. Status stunting ditentukan jika nilai minus dua standar deviasi median (Onis, 2018). Faktor yang dapat menyebabkan stunting meliputi kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Faktor-faktor tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama (kronik). Kekurangan energi kronis atau anemia selama masa kehamilan dapat mengakibatkan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Tingginya prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah diduga menjadi faktor penyumbang utama tingginya angka stunting di Indonesia. (Romadoniyah & DKK, 2022)

Stunting tidak hanya dipicu oleh masalah gizi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang saling berhubungan. Penelitian di Indonesia telah banyak mengungkapkan faktor-faktor risiko stunting. Risiko stunting dapat dimulai sejak masa konsepsi, yaitu dari faktor ibu yang kurang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sejak hamil sampai melahirkan. Layanan kesehatan selama masa kehamilan, pascamelahirkan, dan pendidikan dini yang berkualitas sangat penting untuk mengurangi risiko stunting, termasuk konsumsi suplemen zat besi yang cukup saat hamil, pemberian ASI eksklusif, dan MP-ASI yang baik. Menurut beberapa studi, ada hubungan antara kebiasaan buang air besar di tempat terbuka dengan peningkatan tingkat stunting. Hal ini dikarenakan kotoran manusia yang dibuang di tempat terbuka dapat menjadi media bagi serangga atau lalat untuk menyebarkan bakteri pada peralatan rumah tangga, terutama peralatan

makan, yang berisiko menyebabkan diare. Diare yang berulang dan sering pada anak-anak dapat meningkatkan kemungkinan stunting karena hilangnya nutrisi yang diterima oleh tubuh dan penurunan fungsi dinding usus untuk penyerapan nutrisi. Selain itu, kotoran manusia juga dapat mengkontaminasi lingkungan sekitar, sehingga dampaknya tidak hanya terbatas pada satu orang atau satu keluarga saja, tetapi juga orang-orang lain di sekitarnya (Nirmalasari, 2020).

Stunting merupakan masalah global yang diakui dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan diharapkan untuk dapat ditangani dengan baik. Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan SDGs kedua yaitu mengakhiri kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi. Penanggulangan stunting adalah salah satu target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025. Stunting memerlukan perhatian khusus karena dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak jika tidak segera ditangani dengan baik.

Wadah *Foundation* memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting di Indonesia meliputi faktor ibu, anak, dan lingkungan. Faktor ibu meliputi usia ibu saat hamil, lingkaran lengan atas ibu saat hamil, tinggi ibu, pemberian ASI atau MPASI, inisiasi menyusui dini, dan kualitas makanan. Faktor anak meliputi riwayat berat badan lahir rendah (BBLR) atau prematur, jenis kelamin laki-laki, riwayat penyakit neonatal, riwayat diare yang sering dan berulang, riwayat penyakit menular, dan anak yang tidak mendapat imunisasi. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi risiko stunting meliputi status sosial ekonomi yang rendah, pendidikan keluarga terutama ibu yang kurang, pendapatan keluarga yang kurang, kebiasaan buang air besar di tempat terbuka, air minum yang tidak diolah, dan tingginya

pajanan pestisida (Nirmalasari, 2020). Wadah biasanya melakukan kegiatan pelatihan ini melalui *zoom meeting* agar kegiatan tersebut dalam dijangkau dalam skala yang luas, maka dari itu yayasan ini sudah merupakan filantropi modern.

2.2.4 Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Kesehatan

NGO (*Non-Governmental Organization*), juga dikenal sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia, adalah organisasi non-profit yang didirikan dengan fokus pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. NGO beroperasi secara independen tanpa keterlibatan pemerintah dan tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial.

Sebagai organisasi nirlaba, NGO tidak mengharapkan imbalan finansial atas aktivitas yang dilakukan. Sumber pendanaan untuk kegiatan operasional NGO berasal dari berbagai sumber. Ini termasuk donasi dari perusahaan, sumbangan sukarela dari masyarakat, dukungan dari yayasan, serta usaha penjualan barang atau jasa untuk mengumpulkan dana.

Kutipan dalam buku (Dr. Zubaedi, 2013) Umumnya, dalam upaya pengembangan masyarakat, LSM berperan dalam tiga aspek (Srinivas, Hari, 1999: 2) Yaitu:

1. Pertama, terdapat peran dalam kesejahteraan sosial, di mana pemberian dukungan dan amal menjadi fokus utama. Dalam peran ini, LSM berperan sebagai penggagas program dan proyek internal, dengan dukungan dari lembaga donor internasional serta entitas sosial lainnya.
2. Kedua, terdapat peran sebagai perantara, di mana kemampuan komunikasi menjadi kunci dalam pengembangan dan tindakan sosial. Dalam peran ini, LSM menjadi peserta aktif dalam program dan proyek eksternal, dengan dukungan dari agen pemerintah dan lembaga formal lainnya.

3. Ketiga, terdapat peran sebagai penasihat, yang memerlukan penyediaan dorongan, dokumentasi, serta penyebarluasan informasi dan keahlian. Dalam peran ini, LSM berperan sebagai penggerak kolaborasi dengan warga dalam program kerja sama, dengan dukungan dari ahli, profesional, dan sumber-sumber individu lainnya

Menurut pernyataan dari Dhahana (2019). Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, saat ini belum ada aturan yang khusus mengatur Filantropi. Filantropi adalah tindakan sukarela yang dilakukan oleh pihak yang memberikan dukungan dan sumber daya untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan serta untuk memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 angka 9). Meskipun Filantropi belum memiliki peraturan perundang – undangan yang mengatur secara khusus, Filantropi memiliki landasan dasar hukum pengaturan Filantropi di Indonesia. Secara umum, dasar hukum pengaturan filantropi di Indonesia didasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Pusat Analisis Determinan Kesehatan, 2019).

Dalam pertemuan *World Health Assembly* tahun 1997, peran masyarakat ditentukan sebagai proses untuk menciptakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan aktivitas kesehatan, yang akan menghasilkan peningkatan kapasitas mandiri masyarakat. Saat ini, masyarakat berperan dalam menentukan fasilitas dan perawatan teknologi yang sesuai dalam pelayanan kesehatan.

Karena pendekatan yang Wadah lakukan adalah pendekatan komprehensif maka pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah stunting dan mengoptimalkan potensi dalam pembangunan kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat di tingkat rumah tangga di desa. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta dengan pembiayaan kegiatan preventif dan promotif. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat.

2.2.5 Keterlibatan Kesehatan (Stunting) pada Aspek Ketahanan Pangan dan Pendidikan

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta mendukung pertanian berkelanjutan.

Setiap lembaga memiliki prioritas yang beragam dalam program bantuan kemanusiaan. Beberapa di antaranya mengutamakan aspek kesehatan secara langsung. Namun demikian, ada juga yang berfokus pada berbagai aspek lain yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesehatan.

Kondisi stunting pada anak-anak mencerminkan dampak yang luas dari kekurangan gizi kronis dan pengalaman berulang kali penyakit, yang dipicu oleh kondisi sosial dan ekonomi yang tidak memadai. Upaya yang dapat dilakukan adalah mempertahankan ketahanan pangannya. Perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mengurangi stunting dengan cara menyediakan sumber pangan yang lebih baik, beragam, dan bergizi bagi populasi yang memerlukan, terutama anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. (Kementerian PPN Bappenas, 2020)

Misal dalam kegiatan Wadah yang dilakukannya adalah memberikan pemahaman mengenai tanaman hortikultura, melibatkan penggunaan teknik-teknik khusus seperti pengendalian hama dan penyakit, pengaturan irigasi, pemupukan, pemangkasan, dan pemeliharaan tanah yang baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanaman-tanaman hortikultura tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan.

2.2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukung utama yang dapat memfasilitasi pelaksanaan program pencegahan stunting meliputi Kebijakan dan Komitmen Pemerintah, dalam hal ini dukungan kuat dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang berfokus pada pencegahan stunting sangat penting. Hal ini melibatkan alokasi anggaran yang memadai, kerangka hukum yang mendukung, dan komitmen dari berbagai tingkatan pemerintahan. Menurut Thomas R. Bye, yang diutip dalam Winarno, 1982;² kebijakan publik mencakup semua keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Ini berarti segala hal yang diputuskan oleh pemerintah, termasuk aturan, program, dan rencana, termasuk dalam cakupan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah pusat, yang terdiri dari tiga lembaga utama:

eksekutif (yang menjalankan pemerintahan sehari-hari), legislatif (yang membuat undang-undang), dan yudikatif (yang menegakkan hukum). Semua tiga lembaga ini seharusnya bekerja sama dan bersinergi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Jadi, dalam konteks Wadah Foundation, faktor pendukungnya dapat berasal dari program-program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah, yang bisa mencakup dukungan keuangan, sumber daya, atau kerjasama dalam mencapai tujuan-tujuan yang sama, seperti pencegahan stunting atau perbaikan kesejahteraan anak-anak.

Kemitraan dan kolaborasi untuk menciptakan kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta dapat meningkatkan sumber daya, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan untuk program pencegahan stunting. Selanjutnya faktor pendukung juga dari edukasi dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi pada program pencegahan stunting memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik, kebersihan, dan perawatan kesehatan anak dapat membantu mendorong perubahan perilaku yang dibutuhkan. Selanjutnya memiliki akses gizi yang baik dalam memastikan akses masyarakat ke makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak di bawah usia 2 tahun, sangat penting. Ini termasuk program pemberian makanan tambahan, suplemen gizi, dan diversifikasi pangan. Selanjutnya tak kalah penting yaitu pendidikan dan penyuluhan oleh kader kesehatan, memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada ibu hamil, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya pola makan yang baik, praktik kebersihan, serta perawatan kesehatan anak dapat meningkatkan pemahaman dan praktik yang mendukung pertumbuhan anak yang sehat.

Semua faktor ini berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program pencegahan

stunting serta mengurangi tingkat stunting di masyarakat.

Menurut pembahasan Jurnal (Ahsan & Amalia, 2018) dengan judul jurnal “Kualitas Gizi dan Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Stunting di Indonesia”. Menyatakan beberapa hambatan yang muncul meliputi isu pendidikan, isu hukum, permasalahan ekonomi dan kemiskinan, serta aspek sosial budaya.

- Kendala pertama adalah terkait dengan bidang pendidikan, di mana salah satu permasalahannya adalah kesenjangan gender dalam pendidikan. Isu ini menghambat kemajuan pendidikan perempuan. Oleh karena itu bagi perempuan yang akan menjadi calon ibu mengalami kurangnya pengetahuan untuk langkah-langkah pencegahan stunting, pemberian makanan bergizi dan faktor lainnya penyebab stunting. Kesempatan untuk dapat mewawancarai penerima manfaat menjadi informasi tambahan bahwa pemahaman mengenai stunting di daerah tersebut sangat minim. Ibu dengan satu orang anak yang masih kecil mengakui bahwa dirinya tidak tahu cara pencegahan stunting sebelum diberikan pemahaman oleh kader kesehatan.
- Hambatan kedua terkait dengan permasalahan hukum, terutama dalam hal usia pernikahan. Di Indonesia, peraturan pernikahan masih mengacu pada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menetapkan usia minimum untuk mempelai wanita dan pria. Namun, usia pernikahan yang rendah ini berdampak pada pernikahan anak di usia dini, terutama karena kurangnya keselarasan antara hukum nasional dan hukum adat yang berlaku di tingkat lokal. Usia yang masih muda pada ibu dapat membawa risiko khusus terhadap asupan gizi yang cukup dan cara ibu merawat dan menyusui bayi, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan anak. Selain itu, kehamilan yang terjadi pada usia remaja juga memiliki efek merugikan terhadap kesehatan mental ibu.

- Kendala ketiga adalah dampak ekonomi dan kemiskinan yang mempengaruhi banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah stunting. Meskipun upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan, penting untuk memfokuskan langkah-langkah pada masyarakat rentan di sekitar garis kemiskinan agar dapat mandiri dan tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Upaya ini bisa ditingkatkan melalui program pemberdayaan dari lembaga-lembaga filantropi.
- Hambatan terakhir yang diidentifikasi adalah faktor sosial budaya, terutama terkait dengan pandangan mengenai pernikahan dini dalam budaya dan agama tertentu di Indonesia. Pola pikir ini perlu diubah melalui strategi penanggulangan pernikahan dini yang berfokus pada aspek kesejahteraan bersama (masalah). Upaya sosialisasi dan advokasi melalui ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat membantu mempromosikan pandangan ini sehingga masyarakat lebih mendukung larangan pernikahan dini.

a) Teori Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015. Tujuan-tujuan tersebut adalah Menghapuskan kemiskinan, Menghapuskan kelaparan, Memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua, Pendidikan yang inklusif dan berkualitas, Partisipasi yang setara bagi wanita dan perempuan, Akses air bersih dan sanitasi yang layak, Energi bersih dan terjangkau untuk semua, Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pembangunan berkelanjutan dan infrastruktur, Reduksi ketidakadilan ekonomi, Kota dan perkotaan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, Aksi untuk perubahan iklim, Keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, Perdamaian, keamanan, dan pemerintahan yang baik, Kerja

sama dan solidaritas antar-negara, Keterkaitan antara tujuan-tujuan pembangunan.

Indonesia tengah mewujudkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Salah satu target yang termasuk adalah mengurangi stunting pada tahun 2025. Masalah ini patut mendapat perhatian lebih karena dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, terutama pada perkembangan fisik dan kognitif, jika tidak ditangani dengan baik.

Ide tentang keterkaitan antara filantropi dan pembangunan merupakan hasil dari kontribusi Robert Putnam dan James O Midgley yang meneliti tentang modal sosial dalam pembangunan. Kedua peneliti ini menganggap modal sosial sebagai fondasi dalam konteks pembangunan. Midgley (1995) menjelaskan peran tiga pihak penting dalam membangun kesejahteraan sosial yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang harus saling bekerja sama. Pemerintah berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan sosial, swasta dalam memberikan lapangan kerja yang dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, serta program *corporate social responsibility* yang memfokuskan pada aktivitas sosial-kemanusiaan dan kerja sosial. Sedangkan peran masyarakat adalah sebagai komponen mandiri yang memiliki modal sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya melalui filantropi (aksi kedermawanan) (Tamim, 2016).

Indonesia memiliki tantangan besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu masalah pendanaan. Proyeksi dana yang

dibutuhkan untuk mencapai SDGs di Indonesia diperkirakan sekitar Rp7.700-10.400 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk proyek infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun, pemerintah Indonesia diproyeksikan hanya dapat menutupi 60% dari total kebutuhan pembiayaan tersebut. Gusman Yahya, Direktur Eksekutif Himpunan Filantropi Indonesia dalam webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bersama dengan Himpunan Filantropi Indonesia, menyatakan bahwa pendanaan dari sektor filantropi di Indonesia memiliki potensi besar, salah satunya adalah dari zakat. Dengan potensi lebih dari Rp327 triliun, zakat dapat digunakan untuk pembiayaan SDGs. Dr. Alin Halimatussadiyah, Kepala Grup Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI, menjelaskan hasil kajiannya bahwa dari keterlibatan LPEM FEB UI dalam T20 Indonesia, khususnya pada Task Force 9 yang mengangkat tema "*Global Cooperation for SDGs Financing*". Kajian ini menganalisis situasi saat ini dan tantangan dari partisipasi filantropi dalam mencapai SDGs. Berdasarkan Outlook Filantropi Indonesia (2022), terlihat adanya peningkatan dana yang disalurkan dari filantropi untuk mencapai SDGs di Indonesia. Tujuan SDGs yang paling banyak mendapat dukungan dari filantropi adalah SDG 8 (pertumbuhan ekonomi), disusul oleh SDG 3 (kesehatan) dan SDG 4 (pendidikan) (Maudisha, 2022).

b) Pendanaan

Konsep donasi filantropi secara global memiliki kesamaan dengan struktur pendanaan Kesehatan (Visnu J & DKK, 2020). Pemberi donasi filantropi bisa berfungsi sebagai

1. Pemberi hibah, yang memberikan sumbangan;

Pada peran ini, pemberi donasi filantropi berfungsi sebagai individu atau lembaga yang memberikan sumbangan atau dana kepada suatu tujuan atau inisiatif tertentu. Sumbangan ini dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial, pengembangan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Pemberi hibah memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya finansial yang mendukung berbagai kegiatan filantropi.

2. Perantara, yang mengelola donasi yang diberikan;

Dalam peran ini, pemberi donasi filantropi bisa berperan sebagai perantara yang mengelola dana atau sumbangan yang diberikan oleh pihak lain. Mereka dapat mengumpulkan dana dari berbagai sumber, mengelolanya, dan mendistribusikannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tugas perantara meliputi mengatur alokasi dana, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, serta membantu pemberi hibah dalam memaksimalkan dampak positif dari donasi mereka.

3. Pelaksana, yang menjalankan aktivitas filantropi secara langsung kepada masyarakat

Dalam peran ini, pemberi donasi filantropi berperan sebagai pelaksana yang secara langsung terlibat dalam melaksanakan aktivitas filantropi. Mereka dapat membentuk dan mengoperasikan proyek atau program-program filantropi yang bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini bisa termasuk mendirikan sekolah, rumah sakit, pusat pemberdayaan, dan berbagai program lainnya yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pengembangan komunitas.

Pembiayaan kesehatan diatur dengan tujuan untuk

memudahkan setiap individu dalam mendapatkan layanan kesehatan. Melalui pengumpulan pendapatan, penggabungan sumber daya, dan pembelian layanan kesehatan oleh berbagai lembaga, diharapkan masyarakat dapat dilindungi dari masalah keuangan saat menghadapi penyakit. Konsep ini kemudian diadopsi oleh filantropi sebagai bagian dari cara memberikan bantuan atau sumbangan (*giving*) dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan.

c) Keterlibatan Masyarakat dan Sasaran

Upaya pengembangan komunitas harus senantiasa berupaya memaksimalkan keterlibatan aktif masyarakat, dengan tujuan agar setiap individu dalam masyarakat dapat turut serta dalam proses dan aktivitasnya. Semakin banyak anggota masyarakat yang terlibat secara aktif, semakin banyak tujuan masyarakat dan langkah-langkah yang melibatkan masyarakat dapat tercapai (Dr. Zubaedi, 2013). Meskipun demikian, hal ini tidak mengharuskan setiap individu berpartisipasi dengan cara yang seragam. Mengingat variasi ketrampilan, minat, dan kapabilitas, masyarakat memiliki perbedaan yang signifikan. Kolaborasi sosial yang efektif akan mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi yang beragam dan menjadikannya sebagai landasan yang memungkinkan semua anggota masyarakat yang aktif terlibat merasa dihargai dan diberi peluang setara.

Sering kali, partisipasi dihubungkan dengan keikutsertaan dalam aspek-aspek yang dianggap sebagai elemen inti dalam proses sosial seperti rapat umum, manajemen, dan peran tradisional dalam pelayanan sosial. Meskipun hal ini memegang peran penting, partisipasi memiliki dimensi yang

beragam. Aktivitas sehari-hari seperti memasak, mengorganisir, bermain musik, berpartisipasi dalam olahraga, berkunjung kepada orang lain, berkebun, dan lain sebagainya, semuanya memberikan kontribusi pada keberlangsungan komunitas. Dalam perspektif ini, semua bentuk partisipasi perlu didukung dan diakui sebagai komponen yang bernilai dalam kehidupan masyarakat.

d) Kolaborasi dan Kemitraan

Istilah "kolaborasi" memiliki arti yang luas mengenai kerja sama yang intensif antara dua individu atau lebih, atau antara lembaga-lembaga, dengan tujuan saling memahami dan menyadari pentingnya bekerja bersama sebagai strategi untuk menghadapi situasi penting. Khususnya, kolaborasi merujuk pada kerja sama yang mendalam dalam menghadapi dan memecahkan masalah bersama. Dengan demikian, kolaborasi juga dapat diartikan sebagai tindakan koordinasi yang konstruktif, dijalankan secara langsung untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan terkait pencapaian tujuan atau penyelesaian masalah secara bersama-sama. Prinsip-prinsip manajemen enam M yang minimal meliputi hal-hal berikut.

1. Manusia: individu yang terlibat dalam kolaborasi, termasuk kemungkinan pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan tersebut.
2. Modal: dana atau sumber daya finansial yang dibutuhkan dalam rangka berkolaborasi.
3. Metode: pendekatan, prosedur teknis, dan strategi yang diperlukan dalam melaksanakan kolaborasi.
4. Materi: bahan-bahan yang dibutuhkan, baik dalam bentuk sumber daya fisik maupun sumber daya non-fisik, seperti

perangkat keras atau perangkat lunak.

5. Mesin: peralatan yang digunakan, termasuk peralatan inti maupun peralatan pendukung.
6. Market (Sasaran) : bukan sekadar "pasar" dalam arti bisnis, melainkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kolaborasi tersebut.

2.3 Kerangka Berfikir

Filantropi juga dapat memberikan solusi inovatif dan berorientasi pada hasil untuk memecahkan masalah sosial.



Gambar 2 Bagan Kerangka Berfikir

Melihat dari kerangka berfikir yang sudah dirangkai seperti bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Konsep dasar: stunting adalah masalah kesehatan yang serius bagi anak-anak dan memiliki dampak jangka panjang pada kualitas hidup

dan kapasitas produktif mereka.

2. Masalah: stunting merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, seperti malnutrisi, sanitasi yang buruk, air bersih yang tidak tersedia, dan kurangnya akses ke pendidikan.
3. Keterbatasan pemerintah: pemerintah seringkali memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan dana untuk mengatasi masalah stunting secara efektif.
4. Peran lembaga filantropi: lembaga filantropi memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi stunting dengan memberikan dukungan finansial dan sumber daya untuk program-program yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi.
5. Strategi lembaga filantropi: Lembaga filantropi dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan program-program kesehatan yang efektif dan berkualitas, memperluas akses ke pendidikan memberikan pemahaman kepada calon ibu, ibu hamil, ibu yang memiliki balita mengenai pengetahuan stunting, air bersih, dan memperbaiki sanitasi.
6. Dukungan lembaga filantropi: lembaga filantropi juga dapat memberikan dukungan melalui kampanye dan sentuhan kemanusiaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan nutrisi bagi anak-anak.
7. Hasil akhir: dengan bantuan lembaga filantropi, stunting dapat dikurangi dan masalah-masalah kesehatan dan malnutrisi dapat ditangani, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan produktif.